

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk lebih lanjut, penulis juga menambahkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dengan tujuan sebagai pelengkap analisa. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Dalam artikel yang berjudul *Sustainable and Ethical Fashion: The Environmental and Morality Issues* karya Najmul Kadir Kaikobad, dkk., dijelaskan bahwa mode pakaian merupakan salah satu pembahasan yang sedang banyak dibicarakan orang, terutama perihal kesadaran, salah satunya di Bangladesh yang terkenal sebagai negara manufaktur tekstil dan pakaian di dunia. Penggunaan pakaian dan tren mode trend dengan penuh kesadaran atau *consciousness* telah hadir dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat setiap harinya.

Dalam perkembangannya, isu tersebut menciptakan konsep berkelanjutan dalam industri pakaian atau dikenal dengan mode pakaian berkelanjutan di mana timbul perhatian dan perhitungan atas dampak lingkungan dan sosial dalam tahap produksi pakaian dan jejak karbon (*carbon footprint*) yang ditimbulkan setelahnya. Ada banyak faktor yang mendorong terciptanya etika pakaian dalam industri ini. Meskipun begitu, hanya segelintir aktor dalam industri tekstil dan pakaian jadi yang secara signifikan merubah proses produksinya menjadi sepenuhnya ramah

lingkungan salah satunya dengan menggunakan bahan fiber daur ulang. Artikel ini menyertakan serangkaian tinjauan literatur terkait mode pakaian berkelanjutan, yang mana salah satunya adalah tulisan ilmiah karya Holly Pui-Yan Ho dan Tsan-Ming Choi pada tahun 2012 yang menguraikan alasan transformasi perusahaan-perusahaan di industri pakaian beralih ke konsep peduli lingkungan dan menilai rantai pasokan dan model bisnis berkelanjutan yang mereka implementasikan. Yan Ho dan Choi, melalui hasil tulisan ilmiahnya, menyatakan bahwa pertimbangan atas proses pengembangan dan pengawasan siklus hidup produk yang menyeluruh yang diimplementasikan melalui manajemen tantangan lingkungan strategis dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang menguntungkan bagi perusahaan mode pakaian.¹⁶ Penilaian lingkungan dan sosial yang dimaksud adalah etos dalam manufaktur produk, yakni tenaga kerja bebas *sweatshop* (pelanggaran hak asasi manusia), produksi hemat energi, energi alternatif, dan pewarna tekstil ramah lingkungan.

Dalam mode pakaian jadi masa kini, penggunaan serat daur ulang yang diperoleh dari limbah kain dipromosikan sebagai salah satu upaya pertama pihak industri pakaian dalam menerapkan konsep berkelanjutan. Artikel ini juga menyebutkan sejumlah perusahaan retail pakaian dunia yang mulai ikut berkomitmen dalam melaksanakan etika pakaian, salah

¹⁶ Ho, H. P.-Y. & Choi, T.-M., 2012. A Five-R analysis for sustainable fashion supply chain management in Hong Kong: a case analysis.. *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*, 16(2).

satunya datang dari H&M yang dalam komitmennya telah memiliki kebijakan berkelanjutan (*sustainable policy*) tersendiri serta sejumlah *public figure* yang mempromosikan gerakan ini. Transformasi dalam industri pakaian ini tidak lain juga didorong oleh perhatian masyarakat terhadap berkelanjutan.¹⁷

a) Berikutnya adalah artikel karya Rachel Bick, Erika Halsey dan Christine C. Ekenga yang berjudul *The global environmental injustice of fast fashion* menjelaskan dampak negatif dari aktivitas produksi dalam industri pakaian. Bick, Halsey dan Ekenga mendeskripsikan pakaian jadi sebagai produk industri yang selalu tersedia bagi masyarakat. Dengan tingginya dorongan masyarakat dalam mengonsumsi pakaian jadi, *outsourcing* di luar negara perusahaan pusat (*home country*) dilakukan untuk menekan biaya produksi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah atau LMICs (*Low to Middle-Income Countries*). Artikel ini memaparkan bahwa globalisasi menciptakan pertumbuhan ekonomi berskala global, dimana internasionalisasi rantai pasokan (*supply chain*) malah memberikan dampak dan pengaruh buruk terhadap kesejahteraan di negara-negara berpendapatan menengah hingga rendah (LMICs). Hal tersebut merupakan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat dalam rantai produksi pakaian jadi, seperti kerusakan

¹⁷ Kaikobad, N. K., Bhuiyan, M. Z. A., Zobaida, H. N. & Daizy, A. H., 2015. Sustainable and Ethical Fashion: The Environmental and Morality Issues. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 20(8), hal. 17-22.

lingkungan, kesehatan manusia, dan hak asasi manusia (HAM); baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam literatur ilmiahnya, Bick dkk menjadikan situasi sektor industri pakaian jadi Amerika Serikat sebagai contoh ketidakadilan lingkungan global. Bick dkk mengungkapkan bahwa keadilan lingkungan merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan penempatan lokasi pembuangan sampah berbahaya di sekitar pemukiman komunitas masyarakat kulit berwarna (*people of color*). Konsumsi dan produksi berkelanjutan merupakan poin kedua belas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana pelaksanaan rencana nasional dan sektoral, praktik bisnis yang berkelanjutan, perilaku konsumen dan mitigasi, serta eliminasi mode pakaian jadi menjadi tujuan global dalam mendukung keadilan lingkungan. Hal-hal yang digaris besari terletak pada unsur-unsur yang membahayakan lingkungan dan buruh selama tahap produksi berjalan, seperti penggunaan pewarna kimia dan penggunaan porsi air yang besar, pelaksanaan keselamatan kerja buruh yang rendah, dan pembuangan limbah tekstil.

Untuk itu diperlukan beragam inovasi dari berbagai pihak, baik dari perusahaan hingga masyarakat, dalam menjamin keadilan lingkungan. Terdapat beberapa pengembangan pada industri tekstil dan pakaian dalam menciptakan keadilan lingkungan, di antaranya penggunaan serat kain alami seperti *Lyocell*, pelaksanaan produksi yang sesuai dengan sertifikasi internasional, pelaksanaan kebijakan yang mengurangi bahaya kesehatan

lingkungan, dan penggunaan pakaian dengan siklus hidup panjang maupun pakaian bekas (*second-hand*). Dengan hadirnya peran dari perusahaan, pembuat kebijakan, ilmuwan dan juga konsumen dalam menggerakkan unsur berkelanjutan, diharapkan dapat memberantas adanya ketidakadilan sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri pakaian.¹⁸

b) Sebuah artikel terkait keberlanjutan dalam industri pakaian berjudul *Global Fashion Brands: Does Sustainability Make Business Sense?* karya Rohit Choraria, Medha Jain, Praguni Goel menjelaskan sensitivitas yang terjadi dari perubahan keuangan terhadap perubahan berkelanjutan dalam industri pakaian global. Dalam industri tekstil, mode pakaian jadi dapat dikatakan sebagai rantai penyambung kegiatan produksi pakaian secara kilat menuju lingkungan ritel yang dapat kita lihat setiap saat. Sebaliknya, mode pakaian berkelanjutan adalah tren dan mekanisme yang mendorong produk dan sistem pakaian jadi menuju keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial yang lebih baik. Mode pakaian berkelanjutan juga meliputi proses sosial, ekonomi, lingkungan dan keuangan yang saling terkait. Tidak hanya itu, tren ini juga melihat mode pakaian dari sudut pandang banyak pemangku kepentingan, yaitu konsumen dan produsen, semua makhluk dan penghuni planet ini dan masa depan. Harga nyata yang harus dibayar dari sebuah pakaian tidak hanya terbatas bahan, tenaga kerja, dan pemasaran, tetapi juga polusi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM),

¹⁸ Bick, R., Halsey, E. & Ekenga, C. C., 2018. The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health*, 17(92), hal. 1-4.

emisi karbondioksida, limbah tekstil dalam jumlah yang besar, dan hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan.

Bagi suatu perusahaan, penerapan konsep berkelanjutan dianggap kurang memadai, khususnya dalam menghasilkan keuntungan dari operasional bisnis mereka. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan hendak melakukan sesuatu di luar tujuan bisnis, dibutuhkan keuangan yang memadai; di mana terdapat peran utama dari penjualan dan laba bersih dalam indikator keuangan sebagai indikator layak atau tidaknya perusahaan tersebut dapat menerapkan keberlanjutan. Dalam tulisannya, Choraria, Jain, dan Goel menggunakan lima nilai utama dari Indeks Transparansi Mode (*Fashion Transparency Index/FTI*) yakni Komitmen dan Kebijakan (*Policy and Commitments*), Pendekatan Pengelolaan (*Governance Approach*), Penelusuran (*Traceability*), dan Permasalahan yang menjadi sorotan (*Spotlight Issues*). Hasilnya, terdapat keterkaitan antara penjualan dan keuntungan bersih dalam penerapan berkelanjutan yang transparan dari sebuah merek dagang. Ketika suatu perusahaan memiliki tingkat angka penjualan tinggi, maka terdapat kemungkinan besar perusahaan tersebut dapat mengimplementasikan unsur berkelanjutan. Adapun beberapa merek perusahaan mulai tertarik dalam penerapan berkelanjutan dan mengalami peningkatan skor FTI seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan akan unsur tersebut. Mode pakaian global memiliki siklus produksi yang sangat panjang dan

kompleks yang sepenuhnya dapat dipahami pada masa kini; di mana masing-masing tahapan memiliki biaya manusia dan lingkungan sendiri.

Transparansi merupakan kunci utama dari keberlanjutan di dunia mode pakaian, terutama dalam pengelolaan rantai pasokan. Hal tersebut membuka peluang bagi para buruh pabrik di negara-negara berupah rendah untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan. Choraria dkk juga menyatakan bahwa hubungan kausal antara penjualan dan keuntungan tidak dapat dijadikan ukuran dalam kebijakan keberlanjutan yang mana lebih dari urusan moral etika ketika terdapat perusahaan yang masih memiliki skor FTI tinggi meskipun telah mengalami penurunan angka penjualan.¹⁹

Adapun ketiga atikel tersebut dipilih karena memiliki persamaan dengan penelitian ini. Persamaan yang ada terletak pada pembahasan mengenai dampak dan pengaruh sosial-ekonomi dan lingkungan serta implementasi pembangunan berkelanjutan dalam industri pakaian. Meskipun begitu, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dan ketiga artikel tersebut di antaranya: *Pertama*, artikel karya Kaikobad, dkk. berfokus pada aktivitas berkelanjutan dari merek pakaian yang ada saat ini. Artikel ini menyebutkan serangkaian penelitian terdahulu yang serupa beserta merek pakaian dan upaya berkelanjutan mereka. *Kedua*, artikel karya Bick, Halsey, dan Ekenga berfokus pada dampak negatif rantai produksi industri pakaian terhadap negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah

¹⁹ Choraria, R., Jain, M. & Goel, P., 2020. Global Fashion Brands: Does Sustainability Make Business Sense?. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 9(1), hal. 895-903.

(LMIC) serta peran aktor terkait dalam membentuk solusi secara umum. *Ketiga*, artikel karya Choraria, Jain, dan Goel berfokus pada keterkaitan sensitivitas finansial dalam pelaksanaan keberlanjutan oleh perusahaan ataupun merek dagang industri pakaian. Berdasarkan topik yang akan diteliti oleh penulis, ketiga artikel tersebut dapat dijadikan sebagai acuan penelitian.

2.2. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teori utama dari ekonomi politik internasional, konsep pembangunan berkelanjutan melalui SDGs, dan konsep perusahaan multinasional atau MNC. Ketiga teori dan konsep tersebut dipilih karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa masalah penelitian yang saling berkaitan. Adapun penjelasan teori dan konsep yang disebut, antara lain:

2.2.1. Teori Ekonomi Politik Internasional

Teori ekonomi politik internasional merupakan salah satu teori yang menjelaskan hubungan politik dan ekonomi dalam hubungan internasional. Robert Gilpin mendefinisikan ekonomi politik internasional sebagai hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi; mengejar kekuasaan dan kekayaan.²⁰ Ia juga menambahkan bahwa baik aspek politik maupun ekonomi tidak mengungguli satu sama lain melainkan landasan aturan aktivitas manusia yang interaktif. Dalam bukunya, *The Political Economy of International Relations*,

²⁰ Gilpin, R., 1987. *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.

Gilpin menyebutkan tiga perspektif dalam ekonomi politik. *Pertama*, perspektif liberal menjelaskan bahwa politik dan pasar merupakan unsur terpisah yang tidak dapat menyatu. Menurut perspektif ini, cara untuk mencapai suatu keuntungan ekonomi (kekayaan) adalah dengan adanya keberadaan pasar bebas (*free market*) dengan minimnya keterlibatan negara atau pemerintah dalam mengatur aktivitas dan perilaku ekonominya.²¹

Kedua, perspektif nasionalis dalam ekonomi politik menjelaskan bahwa keberadaan dan tujuan adanya kegiatan ekonomi patuh terhadap dengan kepentingan negara. Perspektif ekonomi ini melihat ekonomi nasional sebagai kepentingan yang tidak melebihi keamanan dan keselamatan negara. Daripada ketergantungan ekonomi, nasionalis lebih condong pada kemandirian ekonomi.²² *Ketiga*, perspektif marxis merupakan satu dari tiga pandangan ekonomi politik yang melihat kapitalisme sebagai kepemilikan pribadi atas tanah dan buruh yang mengejar keuntungan. Oleh karena itu, marxis menawarkan adanya keseimbangan (*equilibrium*) melalui keberpihakan kepada kaum buruh dan pemerataan ekonomi yang diatur oleh negara.²³ Ekonomi politik internasional dipilih karena teori-teorinya menjelaskan keterkaitan antara sifat pasar dan peran aktor yang terlibat di dalamnya. Teori ini ditujukan sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena globalisasi di bidang ekonomi dan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

menganalisa aktivitas pasar di sektor industri pakaian yang mencakup rantai nilai dan pasokan globalnya

2.2.2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Konsep keberlanjutan dalam pembangunan peradaban manusia terlahir dari urgensi ketidakseimbangan manusia dan ekologi yang menghasilkan konsekuensi negatif terhadap lingkungan hidup (contoh: perubahan iklim global, kemiskinan dan kelaparan).²⁴ Berdasarkan laporan PBB dalam *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan atau *sustainability* merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang.²⁵ Kegiatan tersebut saling mengaitkan aspek lingkungan dengan aspek sosial dan ekonomi yang kini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Adapun konsep ini berasaskan dari *triple bottom line* yang merujuk pada keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), keberlanjutan sosial (*social sustainability*), dan keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*).²⁶

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadai, PBB sebagai organisasi internasional membangun sebuah program yang dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen kuat yang dikenal sebagai *Sustainable*

²⁴ Klarin, T., 2018. The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 21, No. 1, hal. 67-94.

²⁵ United Nations, 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Oslo: UN Documents.

²⁶ Klarin, T., *Op.cit.*

Development Goals atau SDGs. Program ini bukanlah yang pertama, melainkan adopsi pengembangan dari program sebelumnya yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs) di tahun 2015.²⁷ SDGs ditujukan untuk memberantas kemiskinan untuk tercapainya kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang terlindungi secara global.²⁸ Selain itu, SDGs juga diperlukan sebagai acuan dalam membentuk kerangka kerja pembangunan yang disesuaikan dengan situasi global.²⁹

Pada program jangka panjang ini, terdapat 17 poin tujuan yang difokuskan dari SDGs yakni kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, kualitas kebersihan, energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, ketidaksetaraan, kota yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi, iklim, kehidupan laut dan darat, perdamaian dan keadilan, serta kerjasama global. Melihat semakin luasnya cakupan program pembangunan berkelanjutan ini, maka aktor yang terlibat tidak hanya dari negara saja melainkan aktor non-negara seperti NGOs, MNCs hingga individu di dalam masyarakat juga ikut serta. Konsep ini dipilih karena dapat menjelaskan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di sektor industri pakaian dan digunakan untuk menganalisa implemementasi kebijakan mode pakaian (*sustainable fashion policy*) berkelanjutan yang dilakukan oleh H&M.

²⁷ UNDESA, 2021. *The 17 Goals*. [Online] Available at: <https://sdgs.un.org/goals> [Diakses 28 November 2021].

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wahyuningsih, 2017. Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), hal. 390-399.

2.2.3. Konsep Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation)

Perusahaan multinasional atau dikenal dengan sebutan MNC merupakan perusahaan yang berbasis pada satu negara, tetapi memiliki kantor lain yang beroperasi selain *home country*-nya. Robert Gilpin, dikutip oleh Bakry, memberikan definisi dari MNC sebagai perusahaan yang memegang dan mengelola serangkaian unit bisnisnya di lebih dari satu negara dengan menggunakan sistem oligopoli.³⁰ Dalam mengoperasikan unitnya, MNC memiliki prinsip untuk mempertahankan biaya produksi yang minimum untuk memenuhi permintaan pasar global. MNC merupakan aktor baru yang independen dalam hubungan internasional pasca Perang Dingin.

Unit operasional MNC memang banyak, terutama di negara-negara berkembang dengan populasi yang tinggi. Selain menyalurkan investasi asing (FDI), kehadiran MNC di suatu negara dapat memberikan sejumlah keuntungan lain seperti transfer teknologi dan keterampilan manajerial, optimalisasi sumber daya dan pelatihan tenaga kerja.³¹ Oleh karena itu, MNC dipercaya dapat mendorong naiknya pendapatan per kapita suatu negara untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi pula. Dalam hal ini, operasi MNC di suatu negara dapat memberikan keuntungan dan kerugian yang berkaitan di antaranya eksploitasi sumber daya alam dan manusia hingga ancaman kedaulatan negara.

³⁰ Bakry, U. S., 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.

³¹ Solomon, L. D., 1976. Multinational Corporations and the Emerging World Order. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 8(2), hal. 329-428.

Terlepas dari pro dan kontra bagaimana perusahaan multinasional beroperasi dan melebarkan sayapnya di dunia internasional, MNC menjadi aktor yang berpengaruh dalam ranah bisnis dan perdagangan internasional.³² Artinya, perusahaan multinasional memegang peranan yang penting dimana setiap kebijakannya dapat memberikan pengaruh terhadap aktor lain dalam politik global yang sistemnya semakin liberal dengan bergesernya poros ekonomi dunia di kawasan Indo-Pasifik. Pemilihan konsep ini dikarenakan dapat menjelaskan berjalannya suatu MNC di tatanan global sehingga dapat digunakan untuk menganalisa operasional produksi dan bisnis H&M.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat dan mendasar terkait garis besar isi dari penelitian ini. Berdasarkan Gambar 2.1, penelitian dimulai dengan pemaparan permasalahan global yang terjadi di industri pakaian pada anak sub bab Latar Belakang. Penulis akan menjelaskan secara umum asal mula munculnya permasalahan global dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan industri pakaian. Dengan berkembangnya globalisasi dan industrialisasi, permasalahan global menjadi semakin terhubung sehingga diperlukan sebuah analisa terhadap aktor yang berkaitan yakni H&M, sebagai perusahaan multinasional di dalam tatanan perdagangan internasional yang liberal, yang juga tengah mengedepankan agenda berkelanjutannya sebagai bentuk partisipasi dalam memberantas permasalahan global.

³² Bakry, U. S., *Op.cit.*

Dengan menjadikan agenda global PBB yaitu SDGs sebagai acuan dasar, H&M membentuk kebijakan berkelanjutannya sendiri dan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan operasional bisnisnya di bidang industri pakaian sehingga kebijakan tersebut juga dikenal dengan kebijakan mode pakaian berkelanjutan (*sustainable fashion policy*). Kebijakan ini kemudian diimplementasikan pada seluruh rantai produksi, khususnya pada produk pakaian *Conscious Collection* yang telah hadir sejak tahun 2010. Penelitian ini akan lebih berfokus pada penerapan kebijakan terhadap produk pada tahun 2019-2021 di mana konsep pembangunan berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap mode pakaian tengah melejit di kalangan masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran